

# **TANGGUNG JAWAB BAPAK TERHADAP ANAK BELUM DEWASA DALAM KASUS PERCERAIAN**

**( Studi Dalam Perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang  
Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Malang )**

Rosita Eka Febrina; Ulfa Azizah, SH., MKn. ; M. Hisyam Syafieodin, SH.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

sita.rosita64@yahoo.co.id

## **ABSTRAK**

Skripsi ini mengkaji mengenai tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian perspektif Pasal 41 (b) juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam tanggung jawab tersebut tentunya ada kendala – kendala yang dihadapi oleh bapak ataupun ibu ( mantan istrinya ) beserta solusinya. Perceraian hanya memutus hubungan antara mantan suami dan mantan istri tidak demikian hubungan orang tua dengan anaknya terutama nafkahnya. Bapak bertanggung jawab atas biaya hidup anak meskipun setelah perceraian dilakukan anak ikut dengan ibunya. Tanggung jawab tersebut dibebankan kepadanya sampai anak tersebut dewasa.

Berdasarkan hal tersebut diatas, skripsi ini mengangkat rumusan masalah : (1) Bagaimana tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian jika dianalisis dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? (2) Adakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian jika dianalisis terkait Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana solusi penyelesaian atas hambatan atau kendala tersebut ?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang lokasinya di Pengadilan Agama Malang. Dari penelitian tersebut penulis mendapatkan jawaban atas rumusan masalah tanggung jawab bapak terhadap anak yang belum dewasa dalam kasus perceraian yang meliputi berbagai hal serta kendala pelaksanaan tersebut beserta solusinya dari beberapa responden yang berjumlah 6 orang melalui wawancara sebagai data primernya dan data sekundernya didapatkan dari library research.

Dari hasil penelitian tersebut dengan metode diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa meliputi biaya hidup anak dari ASI sampai rekreasi sampai petuah – petuah untuk kebutuhan rohaninya demi mencapai masa depan yang lebih baik. Kendala yang didapat pada umumnya dari lingkup mereka sendiri seperti tidak diperbolehkannya anak untuk bertemu bapaknya lagi sehingga tidak dapat dilakukannya tanggung jawab tersebut. Hal lain yang menjadi kendala bisa juga dari bapak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya yaitu bapak tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Sebaiknya Pengadilan Agama melakukan pengawasan atas eksekusi pemberian nafkah anak telah sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak

## ***ABSTRACT***

This thesis examines the responsibility of the father of the minor child in a divorce case perspective of Article 41 ( b ) in conjunction with Article 45 ( 2 ) Act - Act No. 1 of 1974 and may assume the responsibilities of the existing constraints - constraints faced by the father or mother ( his ex-wife ) and solutions . Divorce just break the link between ex- husband and ex- wife was not so relationship with her parents , especially her living . Mr responsible for the cost of living after divorce children although children do go with her mother . The responsibilities assigned to him until the child is an adult .

Based on the above , this paper raised the formulation of the problem : ( 1 ) How is the responsibility of the father of a minor child in a divorce case when analyzed in the perspective of Article 41 ( b ) in conjunction with Article 45 ( 2 ) of Law No. 1 of 1974 ? ( 2 ) Are there any obstacles / barriers in the implementation of the responsibility of the father of the minor child in a divorce case when analyzed related to Article 41 ( b ) in conjunction with Article 45 ( 2 ) Act - Act No. 1 of 1974 and how the solution Marriage settlement of barriers or obstacles the ?

This study is an empirical legal research using sociological juridical approach , which are located in the Religious Malang . From these studies the authors get the answer to the problem formulation responsibility of the father of a minor child in a divorce case that includes a variety of things as well as the implementation of constraints and solutions of some respondents , amounting to 6 people through interviews as the data of primary and secondary data obtained from library research .

From the results of these studies with the above method , the authors obtained answers to existing problems that the responsibility of the father to the child not include cost of living adult children of breastfeeding to recreation to advice - advice for spiritual needs in order to achieve a better future . Constraints are obtained in general from their own sphere as a child not being allowed to meet his father again that it can not do that responsibility . Another thing that could be an obstacle from the father who does not carry out the responsibilities that the father does not have a job to meet their needs . Should religious courts to supervise the execution of the provision of a living child in accordance with the decision of the judges or not .

## **A. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan antara suami dan istri dan kemudian dengan lahirnya anak – anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak – anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. Hubungan hukum antara orang tua, anak dan harta kekayaan selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti

gagalnya tujuan perkawinan untuk memebentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia yaitu suami dan istri itu sendiri dan dengan dimungkinkannnya masuk pihak ketiga diantara mereka. Akan tetapi perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut – larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami – istri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Tentu berakibat pada anak – anak putra putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat perbuatan orang tuanya.

Banyaknya kasus perceraian di Indonesia tidak disertai tanggung jawab suami padahal Undang – Undang memberikan perlindungan terutama perlindungan nafkah terhadap anak tersebut. Seperti halnya yang disebutkan dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 bahwa akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah : (a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perseisihan mengenai penguasaan anak – anak Pengadilan memberi keputusannya; (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk meberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Pasal 45 memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni : (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya; (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak

itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kedua Pasal tersebut bisa diketahui bahwa seorang bapak yang bertanggung jawab atas anak tersebut dalam pemeliharaan dan pendidikan terutama apabila anak tersebut masih dibawah umur menurut Undang – Undang. Tanggung jawab seorang bapak tidak akan terputus untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya termasuk nafkah hidup dan pendidikan akan berjalan terus hingga anak – anaknya dewasa atau dalam Pasal 45 (2) UU 1/1974 dinamakan istilahnya sudah kawin atau berdiri sendiri. Bapak tetap akan melaksanakan tanggung jawabnya meskipun perkawinan antara dirinya dengan ibu dari si anak – anak tersebut sudah tidak tersambung lagi. Suami jika ingin menceraikan istrinya tentunya tidak terlepas dari hubungan dengan anaknya terutama masalah pemberian nafkah. Kebanyakan dari perceraian yang ada anak masih belum dewasa mengikuti ibunya, dari hal tersebut seorang suami bertanggung jawab penuh dari pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan meskipun si anak ikut dengan ibunya.

Menurut hukum perkawinan Islam memang yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah mantan istri atau ibu dari anak tersebut. Ibu dalam mengasuh anak itu harus memenuhi syarat – syarat seperti berakal sehat, telah baligh, mampu mendidik, dapat dipercaya dan berakhlak mulia, beragama islam. Akan tetapi bukan berarti bahwa semua tanggung jawab termasuk nafkah berpindah alih kepada ibunya. Anak tetap menjadi tanggung jawab berdua yaitu ibu dan bapaknya. Biaya mengasuh anak yang dibawah umur menurut hukum dibebankan kepada bapak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan

kepada bapak untuk mencukupinya. Misalnya biaya mengasuh, nafkah hidup berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan.<sup>1</sup>

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Malang terus mengalami angka kenaikan. Menurut berita yang terdapat di Kompas.com menyebutkan bahwa sebanyak 246 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Malang berikut berita yang terdapat dalam Kompas.com : **MALANG, KOMPAS.com** — Sebanyak 246 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Malang, Jawa Timur, selama sebulan terakhir mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama (PA) Kota Malang. Setiap tahunnya, angka perceraian di kota pendidikan itu terus mengalami kenaikan. Sejak Januari hingga Oktober 2012 lalu, Pengadilan Agama Kota Malang mencatat ada 1.524 sidang perceraian. "Melihat data perceraian tahun lalu, pada tahun 2013 ini, angka perceraian diprediksi akan meningkat," jelas Kasdulah, Panitera Muda di Pengadilan Agama Kota Malang, Rabu (30/1/2013).

Prediksi tersebut dilihat berdasarkan data yang masuk sejak 1-29 Januari 2013, yang sudah mencapai 246 kasus gugatan perceraian. "Jadi, sebulan Januari 2013 saja, jumlah gugatan cerai yang masuk sudah mencapai 246 kasus," tegas Kasdulah. Jika selama sebulan angka perceraian mencapai 250 kasus, kata Kasdullah, maka dalam setahun angka perceraian mampu mencapai 3.000 kasus. "Sudah meningkat mencapai 4 hingga 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Kasdulah lagi. Lebih jauh Kasdulah menjelaskan, mayoritas penyebab perceraian adalah kasus perselingkuhan. "Selain akibat perselingkuhan atau wanita idaman lain (WIL), juga dipicu karena faktor ekonomi keluarga," sambungnya. Adapun yang kasus perceraian itu mayoritas diajukan oleh pihak istri

---

<sup>1</sup> Hal 102 hukum perkawinan islam Ahmad Azhar Basyir

dalam bentuk gugatan cerai. "Dari seluruh kasus perceraian, sebanyak 698 kasus perceraian di tahun 2012 karena ketidakharmonisan," katanya. Cerai akibat faktor ekonomi mencapai 464 kasus. "Faktor ekonomi yang dimaksud karena suami dinilai tidak bertanggung jawab pada kebutuhan ekonomi keluarganya," kata Kasdullah. Selain itu, tambah Kasdullah, efek pernikahan dini pun menyumbang angka dalam persentase perceraian di Malang. "Belum waktunya nikah, pihak orang tua sudah memaksakan anaknya dinikahkan. Tapi penyebab nikah usia dini tak terlalu banyak," katanya.<sup>2</sup>

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian jika dianalisis dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Adakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian jika dianalisis terkait Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana solusi penyelesaian atas hambatan atau kendala tersebut ?

---

<sup>2</sup><http://internasional.kompas.com/read/2013/01/30/15085316/Efek.Selingkuh.Sebulan.246.Pasutri.di.Malang.Cerai>



## **C. METODE PENELITIAN**

### **1. JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Melalui penelitian ini dikaji secara mendalam tentang persoalan – persoalan yang berhubungan dengan tanggung jawab bapak terhadap anak yang belum dewasa dalam kasus perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (b) juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara secara empiris tanggung jawab tersebut ditelaah di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang. Fakta – fakta yang timbul dalam masyarakat di Pengadilan Agama Kota Malang yang difahami dari banyaknya perceraian sehingga hal tersebut berdampak pada keberadaan anak yang belum dewasa.

### **2. METODE PENDEKATAN**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berarti dalam penelitian ini permasalahan hukum dikaji secara sosiologis dengan memperhatikan berbagai aspek dan pranata sosial dimana dalam hal ini menitikberatkan pada Pasal 41 (b) Juncto 45 (2) Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan melalui pendekatan sosiologis fakta – fakta dalam masyarakat Kota Malang yang berhubungan dengan masalah perceraian serta bagaimana tanggung jawab bapak terhadap anaknya yang belum dewasa.

### **3. DATA PENELITIAN**

Data primer dapat dari Pengadilan Agama Malang dan dari kalangan Dosen Fakultas Hukum data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari buku – buku tentang perkawinan dan perceraian demikian juga literatur, peraturan – peraturan maupun catatan – catatan penting lainnya yang menjadi data penunjang dari data primer.

### **4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan Studi kepustakaan dan dokumentasi.

### **5. ANALISIS DATA**

Dari data yang diperoleh dan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yang artinya menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan kedalam pembahasan pokok permasalahan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa Dalam Kasus Perceraian dalam Perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Bapak merupakan kepala dalam keluarga jika diumpamakan sebagai anggota tubuh. Kepala terletak diatas didalamnya terdapat otak yang memiliki perintah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh. Dari perumpamaan tersebut maka dapat dilihat bahwa bapak adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap semua anggota keluarga. Tanggung jawab bapak mulai dari ibu atau istri dan kemudian berlanjut kepada keturunan mereka yaitu anak – anaknya. Pentingnya tanggung jawab ini sehingga Undang – Undang pun mengaturnya karena dewasa ini banyak kasus – kasus yang bertentangan dengan tanggung jawab bapak tersebut sebagaimana mestinya.

Sejak anak lahir dari perkawinan yang sah, lahirlah kekuasaan orang tua, sepanjang anak itu hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Kecuali dalam perjalanan waktu tersebut kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan oleh hakim atau perkawinan orang tuanya diputus cerai. Demikian juga dengan matinya anak, maka kekuasaan orang tua dengan sendirinya berakhir, yakni hak untuk mengoreksi kelakuan anak yang tidak baik.<sup>3</sup> Pasal 41 (b) berbunyi “ *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang*

---

3 Hukum Perkawinan Indonesia, MR Martiman Prodjohamidjojo, hal 60

*diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.* “ Pasal 41 (b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberikan penjelasan yang cukup mengenai tanggung jawab bapak.

Kata semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tentu saja artinya tidak sesempit kata – katanya. Biaya tersebut tidak hanya seputar biaya spp sekolah dan makan sehari – hari, akan tetapi meliputi biaya – biaya lainnya yang diperlukan anak untuk menunjang pendidikan dan kehidupan lebih baiknya karena tidak mungkin jika seorang bapak menginginkan anaknya untuk hidup dengan tidak baik di masa depan anak tersebut.

Kehidupan lebih baik sang anak di masa mendatang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari anak tersebut masih bayi yang mebutuhkan susu formula dan bubur bayi untuk kebutuhan pangannya yang sangat diperhatikan karena tidak semua makanan bisa dikonsumsi oleh bayi, kemudian kebutuhan sandang untuk melindungi dirinya, juga kebutuhan lainnya seperti obat – obatan, hiburan mainan anak – anak atau refreshing guna memberikan warna dalam hari – harinya. Tumbuh menjadi seorang anak, bapak tetap harus bertanggung jawab untuknya. Orang tua mulai memikirkan sekolah yang bagus untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak mereka. Sekolah membutuhkan bukan hanya biaya spp saja tetapi mulai dari pendaftaran, uang gedung, biaya untuk keperluan lain seperti seragam sekolah, buku – buku, peralatan tulis dan lain sebagainya. Setelah tumbuh menjadi remaja dan dewasa tanggung jawab bapak tidak berhenti saja sampai disitu, masih ada kewajiban – kewajiban lain yang harus ditanggung oleh seorang bapak terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut.

Surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya : “ *Dan ibu – ibu hendaklah menyusui anak – anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah ( menderita ) karena anaknya. Ahli warispun ( berkewajiban ) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*”

Ayat Alquran tersebut sudah jelas bahwa seorang bapak memang bertanggung jawab mengenai nafkah anak, akan tetapi dalam surat Albaqarah lebih lunak lagi karena menyebutkan bahwa seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, sehingga kewajiban nafkah bapak terhadap anaknya didasarkan dari kemampuannya. Apabila bapak tidak sanggup untuk memenuhi nafkah anaknya maka tidak boleh dipaksakan karena jangan sampai seorang bapak menderita karena anaknya. Banyak kejadian sekarang ini seorang bapak yang berjuang keras demi memenuhi kebutuhan anaknya, sampai – sampai ada yang berhutang, mencuri, atau korupsi. Perbuatan tersebut awalnya niatnya baik demi anaknya akan tetapi caranya sangat tidak baik. Semua itu menjadikan seorang bapak menderita, maka dari itu dalam Alquran surat Albaqarah, Allah berfirman bahwa jangan sampai seorang bapak menderita karena anaknya.

Tanggung jawab bapak terhadap anaknya akan terus mengalir sampai sang anak menjadi dewasa meskipun perkawinan bapak dan ibu anak tersebut putus karena perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 (2) “*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*” Perceraian orang tua tidak memutuskan hubungan orang tua dengan anak begitu juga tanggung jawab seorang bapak untuk tetap melaksanakan kewajibannya.

## **2. Kendala atau Hambatan dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa beserta Solusinya Analisa Terkait Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974**

Tanggung jawab bapak terhadap anaknya dalam kasus perceraian tidak semua berjalan dengan baik seperti yang ada dalam peraturan. Banyak kasus yang menyebutkan sisi dari kelalaian bapak, tidak hanya lalai dalam tanggung jawabnya memberikan nafkah bahkan ada juga yang jelas – jelas menelantarkan atau melupakan bahwa bapak tersebut mempunyai anak. Menurut bapak Kasdullah dari Pengadilan Agama Malang, ada sebuah kasus yang menyebutkan bahwa bapak tidak mau bertanggung jawab atau memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya. Setelah ditanya apa alasan bapak tersebut berbuat demikian, hal itu dilakukan karena bapak merasa itu semua

adalah tanggung jawab ibunya. Mengapa demikian ? bapak tersebut menjawab lagi karena salahnya sendiri sang ibu tersebut atau bekas istrinya yang mengajukan cerai gugat. Bapak tersebut tidak mau tau lagi tentang kehidupan bekas istri dan anaknya karena dianggap bahwa bekas istrinya berani mengajukan cerai gugat berarti berani juga untuk menanggung semua resikonya. Resiko yang termasuk didalamnya adalah memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan anaknya.<sup>4</sup>

Hambatan-hambatan yang sering dialami pada saat pelaksanaan pemberian tunjangan nafkah bagi anak setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim di Pengadilan Agama telah menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayahnya setiap bulan. Prakteknya nafkah yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan dan pemberiannya tidak rutin diberikan setiap bulan. Keadaan yang demikian berjalan terus, karena pihak yang memelihara dan mendidik anak yakni ibunya tidak pernah mempermasalahkan atau mempersoalkan kepada pihak mantan suaminya (bapak si anak) atau dapat dikatakan pihak ibu pasrah saja.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian pihak Pengadilan Agama tidak pernah mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak. Pihak Pengadilan Agama baru bertindak bila pihak yang memelihara dan mendidik anak (ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi

---

4 Wawancara dengan bapak Kasdulah dari Pengadilan Agama Malang

Keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi.<sup>5</sup>

Solusi dari kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang adalah bekas istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya Pengadilan akan memanggil bekas suami. Jika suami atau bapak tersebut tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila mantan suami tersebut datang datang untuk memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih dari hari mantan suami tidak melaksanakan atau memenuhi Putusan Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.<sup>6</sup>

## **E. PENUTUP**

Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak akan memutus hubungan dengan anaknya terutama tanggung jawab nafkahnya. Seorang anak yang belum dewasa masih tetap menjadi tanggung jawab bapaknya meskipun keadaan

---

5 WACANA HUKUM VOL.IX, 2 OKT.2011 Oleh: Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo 20 Desember 2013 20.30

6 Wawancara dengan Pak KAsdullah



perkawinan mereka telah terputus karena perceraian. Tanggung jawab bapak terhadap anak tersebut berupa biaya hidup kesehariannya mulai dari ASI sampai rekreasi serta biaya pendidikan demi menunjang masa depan anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri.

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak adalah ketidakmampuan bapak dalam memenuhi biaya hidup anak sehingga tanggung jawab tersebut terbengkalai. Kelalaian dan kesengajaan dari bapak sendiri untuk meninggalkan anaknya yang mengikuti ibunya atau bekas istrinya. Keinginan dari bekas istrinya sendiri untuk memisahkan anaknya dari bapaknya karena merasa mampu sendiri untuk memenuhi biaya hidupnya serta anaknya.

Solusi dari hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak dalam kasus perceraian Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 (b) UU Perkawinan. Bekas istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan, selanjutnya Pengadilan akan memanggil bekas suami. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian bisa dijadikan alasan untuk mempertemukan bapak dan anak tersebut, bahkan untuk menuntut hak – hak anak yang seharusnya dipenuhi dan menjadi tanggung jawab bapak.

Dalam pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian pihak Pengadilan Agama hendaknya mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak. Disamping pengawasan dari Pengadilan Agama hendaknya pihak ibu yang bersama anaknya

juga aktif untuk melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi.